

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**



**OLEH  
WANDY SETIAWAN ISA  
B 111 10 428**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh

**WANDY SETIAWAN ISA**

**B 111 10 428**

pada

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2017**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

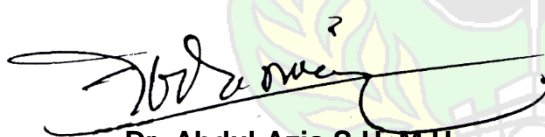
disusun dan diajukan oleh

**WANDY SETIAWAN ISA**  
**B 111 10 428**

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 16 Agustus 2017  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Abdul Azis S.H., M.H.**  
NIP. 19620618 198903 1 002

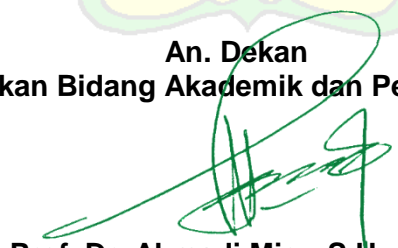
**Sekretaris**



**Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

**An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Wandy Setiawan Isa**

Nomor Induk : **B 111 10428**

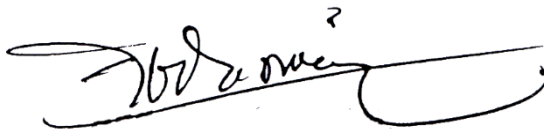
Bagian : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan  
Terorisme**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal

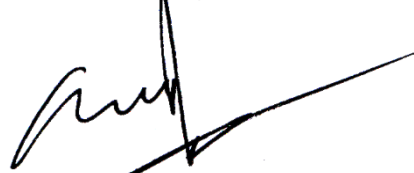
Makassar, Juli 2017

Pembimbing I



**Dr. Abdul Asis SH.,MH.,**  
**NIP. 19620618 198903 1 002**

Pembimbing II



**Dr. Amir Ilyas, SH.,MH.**  
**NIP. 19800710 200604 1 001**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

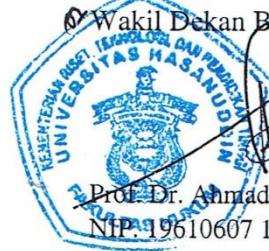
Nama : Wandy Setiawan Isa  
Nomor Induk : B 111 10428  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

WANDY SETIAWAN ISA (B 111 10 428) Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dibimbing oleh Abdul Azis dan Amir Ilyas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan yang perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme apabila subjek hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum pidana baik objektif maupun subjektifnya.. 2). Pertanggung jawaban pada tindak pidana pendanaan terorisme merupakan konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, bentuk pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yaitu pertanggung jawaban ganti rugi dan pidana penjara bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia. Disarankan agar : 1). Undang-undang ini akan sangat efektif berjalan apabila diawali dengan semangat untuk memberantas terorisme, sehingga pemerintah seharusnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat umum mengetahui apa-apa saja yang menjadi indikasi seseorang dikatakan terorisme, 2) Sebaiknya semua perangkat pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan terorisme, perlu menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan pendanaan terorisme dan undang-undang yang terkait dengan masalah pendanaan terorisme, mengingat upaya pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme yang hendak melakukan aksinya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Pendanaan Teroris, Teroris*

## **ABSTRACT**

WANDY SETIAWAN ISA (B 111 10 428) Legal Review Against Criminal Acts Terrorism Funding is guided by Abdul Azis and Amir Ilyas

This study aims to analyze an act can be categorized as a criminal act of terrorist financing and criminal liability of perpetrators of terrorist financing.

The method used in this research is normative juridical research method by using statute approach (statute approach) as well as conceptual approach (conceptual approach). Both primary and secondary legal materials will be inventoried and identified for further use in analyzing the problems associated with this research

The results of this study show: 1). In the case of criminal acts of terrorism financing the subject of law can be said to have committed the act of financing against acts of terrorism if the subject of law has fulfilled the requirements of the criminal law both objectively and subjectively .. 2). The liability of criminal acts of terrorism financing is a consequence of criminal incidents committed by legal subjects, the form of legal liability to the perpetrators of terrorism financing, namely the responsibility for compensation and imprisonment for terrorism financiers in Indonesia. It is recommended that: 1). This law will be very effective if it begins with the spirit to eradicate terrorism, so the government should conduct counseling and socialization so that the general public knows what the indication of a person is said to be terrorism, 2) We recommend all supporting tools of implementation of regulation on eradication of terrorism, Need to harmonize with the rules of terrorism financing legislation and the laws related to the financing of terrorism, considering the efforts to eradicate terrorism financing in Indonesia is expected to be more effective and efficient, especially in ensnaring the perpetrators of terrorism who want to carry out their actions in the territory of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Criminal Acts, Terrorism Funding, responsibility

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada Ayahanda, Ir Muh. Ferial Zawawi dan Dra. Hardiana Ibrahim Msi yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat.



Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

- 1 Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
- 2 Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 3 Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 4 Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 5 Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 6 Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan Jajarannya.
- 7 Bapak Dr. Abdul Azis. S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas., S.H., M.H. Selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih atas bimbinganya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat berberkah.
- 8 Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Bapak H.M. Imran Arief, S.H., M.S., Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. terima kasih atas kesedianya

menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari harapan.

- 9 Bapak Dr., Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta kesedianya setiap kali Penulis berkonsultasi akademik.
- 10 Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Masyarakat dan Pembangunan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
- 11 Terima Kasih Kepada Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.
- 12 Terima Kasih Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. dan Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis.
- 13 Teman-teman Angkatan 2010, 2011, 2012 FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan. Sukses selalu untuk kita semua.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima oleh semua orang yang membutuhkannya.

Makassar, 1 Agustus 2017

Wandy Setiawan Isa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Pidana dan Pemidanaan .....	18
1. Tujuan Pemidanaan .....	20
2. Jenis-Jenis Pidana .....	20
C. Tinjauan Umum tentang Teroris.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34

C. Bahan hukum .....	35
D. Analisis Bahan Hukum .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris .....	42
B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Teroris.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu hal yang membuat terganggunya stabilitas nasional adalah kejahatan terorisme, berikut rangkuman dari beberapa sumber terkait aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia:

1. Bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002 merupakan rangkaian tiga peristiwa pengeboman terus-menerus yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002
2. Bom yang terjadi di hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2003.

3. Terror Bom terjadi tepat di depan kantor Kedutaan Besar Australia, kawasan Kuningan, Jakarta. Terror Bom ini meledak pada tanggal 9 September 2004.
4. Bom Bali II kembali terjadi pada 1 Oktober 2005.
5. Peristiwa bom bunuh diri terjadi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada 17 Juli 2009.
6. ledakan bom bunuh diri terjadi di Masjid Mapolresta Cirebon saat akan melakukan Salat Jumat pada 15 April 2011.
7. Bom Sarinah merupakan serentetan peristiwa bom sebanyak enam ledakan dan juga teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, selama tahun 2016 tindak kejahatan terorisme mengalami kenaikan sebanyak 170 pelaku tindak pidana teroris. "Untuk kejahatan teroris mengalami kenaikan 107 persen jika dibandingkan dengan tahun yang hanya mencapai 82 pelaku.<sup>1</sup> Hal ini semakin memberikan bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dimana jaringan terorisme internasional beroperasi. Indonesia sebagai salah satu wilayah potensial yang dijadikan sebagai salah satu tempat kegiatan operasional jaringan teroris.

Walau demikian, seiring dengan transisi politik yang terus berkembang, sejumlah langkah sistematis telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam

---

<sup>1</sup><https://nasional.sindonews.com/read/1166542/14/selama-2016-kejahatan-terorisme-naik-107-persen-1482931739> diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

kerangka memberantas kejahatan terorisme.<sup>2</sup>Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Terorisme).

Pilihan ini seperti halnya kecenderungan negara-negara lainnya di dunia, dalam merespon kian meningkatnya eskalasi ancaman terorisme. Semakin banyaknya kelompok teroris yang terorganisir, kuatnya dukungan finansial mereka, bentuk ancaman yang kian beragam, serta bertambahnya intensitas ancaman kekerasan, membutuhkan acuan kebijakan hukum yang memadai guna penanganannya.

Menyikapi kondisi itulah sejumlah negara di dunia kemudian mengambil langkah untuk memperbaharui kerangka hukum penanggulangan terorisme mereka, sebagai jawaban terhadap makin inovatif dan sistematisnya aksi teror. Kaitannya dengan pengesahan instrumen internasional yang terkait dengan penanggulangan terorisme, semenjak awal pemerintah Indonesia juga sudah secara aktif

---

<sup>2</sup>Vinsensio Dugis & Baiq Wardhani, *Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan Dan Penanganan Terorisme Di Indonesia*. Makalah ini ditulis untuk dipresentasikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* Kajian dan Perumusan Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan Dan Penanganan Terorisme di Indonesia, yang diselenggarakan bersama oleh *Indonesia Crime Prevention Foundation* (ICPF) dan Kemitraan Partnership, di Ruang Arjuna Weliarang, Hotel Santika, Jln. Pandegiling 45, Surabaya, Senin 27 Agustus 2007.



turut berpartisipasi, termasuk dalam isu yang masih sangat konvensional, pembajakan pesawat terbang. Hal ini tentu sangat berkait erat kepentingan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, juga bagian dari implementasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Beberapa instrumen internasional terkait terorisme yang disahkan Indonesia di masa lalu antara lain:

- a) *Convention on Offences and Certain other Act Committed on Board Aircraft (Konvensi Tokyo 1963)*
- b) *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Konvensi The Hague 1970); dan*
- c) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation (Konvensi Montreal 1971) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976.*
- d) *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (ICSTB)*
- e) *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (ICSTF).*
- f) *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT),*
- g) *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT), yang diratifikasi pada 2014.*

Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK), Penyedia

Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum guna mendekteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.<sup>3</sup>

Pemutusan mata rantai pendanaan terorisme tersebut tentunya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara benar dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (selanjutnya disingkat UU 6/2006) maka Indonesia juga wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundangundangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif.

Unsur pendanaan adalah salah satu faktor utama dalam setiap aksi teroris, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus

---

<sup>3</sup> Sepanjang empat tahun ini, aliran dana ini didominasi berasal dari Australia. Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menyatakan negara asal yang paling banyak mengalirkan uang untuk terorisme adalah Australia. Transfer sebanyak 97 kali transaksi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik perseorangan maupun kelompok. Negara yang mengirimkan dana untuk terorisme ke Indonesia terbanyak kedua adalah Malaysia sebanyak 44 kali dengan aliran dana sebesar Rp754,8 juta, Singapura tujuh kali dengan jumlah duit sebesar Rp26, 1 juta, serta Filipina satu kali senilai Rp25 juta. Sumber dana diperoleh dari yayasan dan urunan anggota atau simpatisan. <https://beritagar.id/artikel/berita/pembayaran-virtual-instrumen-favorit-pengaliran-dana-terorisme> diakses Pada Tanggal 11 Januari 2017.

diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan, hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris (selanjutnya disebut UU 9/2013). UU 9/2013 merupakan sebuah regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi aksi terorisme yang menitik beratkan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan teroris.

Definisi pendanaan terorisme dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa :

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris

Adapun ruang lingkup UU 19/2013 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah

- a. Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya UU 9/2013 ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana atau aset itu sendiri. Dijelaskan lebih lanjut mengenai siapa saja yang disebut sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 2 Ayat (2).

Undang-Undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila:

- a. dilakukan oleh warga negara Indonesia;
- b. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia;

- c. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia;
- d. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;
- e. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia
- f. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan; atau
- g. dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU 9/2013 diharapkan akan mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

- a) Pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disusun dengan tujuan, antara lain untuk: mengatasi celah-celah yang ada dalam peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme sehingga menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat
- b) mengetahui dan mengatur prosedur dan mekanisme yang jelas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendekatan *follow the money* namun tidak menghambat kegiatan pengelola jasa keuangan
- c) memenuhi Rekomendasi *Financial Action Task Force on MoneyLaundering (FATF) khususnya Nine Special Recommendations*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Teroris

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana pendanaan teroris dalam penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Teroris.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah

- a. Untuk mengetahui suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

#### **a. Secara Akademis**

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pendanaan teroris.

**b. Secara Praktis**

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pendanaan teroris.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>5</sup> arti delik diberi batasan sebagai berikut:

Menurut Pompe,<sup>6</sup> perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding* (*verstoring der rechtsorde*), *waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sedangkan Van Hamel<sup>7</sup> menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung ,2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.7

<sup>6</sup> P.A.F, Lamintang, 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.hlm.182

<sup>7</sup> Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.225

E. Utrecht<sup>8</sup> memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Namun Moeljatno<sup>9</sup> menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Moeljatno<sup>10</sup> sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Zainal Abidin<sup>11</sup> mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.

Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah

---

<sup>8</sup> Marpaung, *Loc.Cit*

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung, PT. Rineka Cipta. hlm.86

<sup>10</sup> Marpaung. *Loc.Cit*

<sup>11</sup> Hamzah. *Op.Cit*. hlm 87



“delik” di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “delik” juga memakai istilah “delik”.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai.

Vos<sup>12</sup> merumuskan delik itu sebagai

“Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”

Simons<sup>13</sup> memberikan definisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Van Hattum<sup>14</sup> mengatakan:

Oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 88

<sup>13</sup> Marpaung. *Op.Cit.* hlm 8

<sup>14</sup> Lamintang, *Op.Cit.* hlm 185

terpaku pada unsur- unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut "*bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid*", termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Pengertian tindak pidana menurut Faried<sup>15</sup> mengatakan bahwa:

"Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur delik. Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

- a. dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusandelik;
- b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. pelaku tersebut dapat dihukum

## **2. Unsur- unsur Tindak Pidana**

Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo<sup>16</sup> menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu: a. unsur melawan hukum, b. unsur kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

---

<sup>15</sup> Zainal Abidin Farid dan Hamzah, Andi. 1983. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hal 33

<sup>16</sup> Poernomo. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Arena Ilmu. Hal 99

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur<sup>17</sup> sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno<sup>18</sup> menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara<sup>19</sup> mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan ( *toerekeningsvatbaarheid* );
2. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu<sup>20</sup>:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 184

<sup>18</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Hukum penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm 104

<sup>19</sup> Marpaung. *Op.Cit*, hlm 10

<sup>20</sup> Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materii*,. Malang, UMM Press. hlm 3-5

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
  - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa:
- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
  - b. Kesalahan (schuld)  
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
    - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
    - 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
    - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum

pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

## 1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat MvT)<sup>21</sup>, *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wetens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya.

Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :

- a) Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- b) Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- c) Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

## 2. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undangundang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

---

<sup>21</sup> Rusli Effendy, 1989. *Asas Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Leppen UMI. Hlm 80

Lebih lanjut<sup>22</sup> menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara<sup>23</sup> mengemukakan bahwa :

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons<sup>24</sup> mengemukakan bahwa kealpaan adalah :

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm 26

<sup>23</sup> Marpaung, *Loc.cit.* hlm13

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm 25

## B. Pidana dan Pemidanaan

Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya. Para pakar memberikan pandangan berbeda-beda dalam - suatu definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para antara lain sebagai berikut<sup>25</sup>

- a. **Hoefnagels**, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.
- b. **Poernomo**, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.
- c. **Utrecht**, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.
- d. **Arrasyid**, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.
- e. **Sudikno**, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.

---

<sup>25</sup>Hambali Thalib, 2005, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, h. 23.

- f. **Kanter dan Sianturi**, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.
- g. **Hambali Thalib**, sanksi hukum dalam arti sanksi negatif yang unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial nonhukum, dan merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.

Lebih lanjut, tugas sanksi adalah<sup>26</sup> merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang, dan juga merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Dari definisi beberapa pakar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan delik menurut undang-undang.

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah sebelumnya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan sanksi dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwenang) berupa pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau delik menurut undang-undang.

---

<sup>26</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, h. 30.



## 1. Tujuan Pemidanaan.

Dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak mampu dalam memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat<sup>27</sup>. berpendapat:

"hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai *crimum meridium*, yaitu sebagai upaya antisipatif preventif agar manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin.

Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara tegas kepada pihak-pihak yang telah terbukti melanggar hukum. Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan untuk membalas si pelaku delik.

## 2. Jenis-Jenis Pidana.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari:

---

<sup>27</sup> Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 30.

a. Pidana pokok, antara lain:

1) Pidana mati

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang dalam prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun (lihat Pasal 340 KUHP). Menurut<sup>28</sup> di dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, secara garis besar memuat tata cara tentang pelaksanaan hukuman mati. Di antara ketentuan yang terpenting adalah :

- 1) Dalam waktu tiga puluh hari, sebelum pelaksanaan hukuman mati, wajib diberitahukan kepada terdakwa tentang pelaksanaannya hukuman mati tersebut, oleh pihak yang diberi kewenangan untuk itu (Jaksa Tinggi atau Jaksa).
- 2) Bagi terdakwa yang kebetulan wanita, dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan hukuman mati harus ditunda sampai lahirnya bayi yang dikandungnya.
- 3) Tempat dilaksanakannya hukuman mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yang biasanya akan ditentukan menurut wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati oleh hakim.
- 4) Pelaksanaan hukuman mati, dilaksanakan oleh regu tembak yang dipimpin oleh Polisi yang perwira.
- 5) Kepala Polisi di wilayah hukum yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman mati, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi atau Jaksa.
- 6) Pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan di depan umum.
- 7) Setelah selesai pelaksanaan hukuman mati (ditembak) maka jenazah diserahkan kepada keluarganya.
- 8) Sebelum pelaksanaan hukuman mati (sebelum ditembak) dalam waktu tiga hari (tiga kali dua puluh empat jam) pihak yang berwenang (Jaksa Tinggi atau Jaksa) harus memberitahukan kepada terdakwa untuk menyampaikan kata-kata atau pesan terakhir kepada seseorang yang dianggap penting dan perlu oleh terdakwa.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 179.

- 9) Setelah pelaksanaan hukuman mati, maka Jaksa atau Jaksa Tinggi tersebut harus membuat berita acara tentang pelaksanaan hukuman mati tersebut yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang kemudian harus dicantumkan dalam surat keputusan.
- 10) Kepala Polisi di daerah yang bersangkutan atau yang ditunjuk (perwira polisi) harus menghadiri pelaksanaan hukuman mati, sementara bagi penasihat hukumnya dapat menghadiri pelaksanaan hukuman mati tersebut apabila ia menghendaki atau atas permintaan terpidana.

Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 KUHAP, terhadap putusan (hukuman) mati dapat dimintakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Di samping upaya hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1950 tentang grasi, terhadap pidana mati diperbolehkan mengajukan grasi kepada Presiden.

## 2) Pidana penjara

Pada prinsipnya hukuman penjara ini, baik untuk seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu, merupakan alternatif dari pidana mati. <sup>29</sup>mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukuman penjara adalah :

"suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut".

Perihal mengenai hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang mengatur:

- a. Pidana penjara seumur hidup atau sementara
- b. Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu tahun dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut
- c. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan dengan pidana

---

<sup>29</sup>Lamintang, *Op. Cit.*, h. 69.

yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal masa lima belas tahun itu dilampai, sebab pidana ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.

- d. Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Jika berpedoman pada Pasal 12 KUHP tersebut, maka seseorang dapat dipidana sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya berkisar antara satu hari sampai dengan dua puluh tahun. Satu hari menurut hukum adalah serentetan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dan satu bulan berarti 30 (tiga puluh) hari (Pasal 97 KUHP).

### 3) Pidana kurungan.

Perihal mengenai hukuman kurungan ini telah diatur dalam Pasal 18 KUHP, yang mengatur:

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun.
- b. Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.
- c. Pidana kurungan tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan di dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. Namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakannya dengan hukuman penjara, antara lain :

- a) Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara mana saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan di daerah di mana terdapat tempat tinggal waktu hukuman itu dijatuhkan.

- b) Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya lebih ringan daripada orang yang dipidana hukuman penjara.
- c) Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam perundang-undangan (Pasal 23 KUHP).
- d) Masa waktu terpendek secara umum bagi hukuman kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal gabungan delik, berulang kali melakukan delik, dan bilamana waktu melakukan delik tersebut menyertakan bendera Republik Indonesia, maka ditambah sepertiganya (Pasal 52 KUHP).

#### 4) Denda.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari pidana pokok, tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan dan juga pelanggaran lalu lintas (untuk pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992).

Berdasarkan KUHP maupun di dalam undang-undang yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa hukuman denda mengalami posisi sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Hukuman denda itu merupakan hukuman utama dengan tidak memberikan jenis pidana lain untuk mengganti pidana denda.
- b. Hukuman denda merupakan hukuman alternatif, sementara pidana utamanya adalah pidana kurungan.

---

<sup>30</sup>*op.cit*, h. 202.

- c. Pidana denda juga merupakan jenis pidana alternatif dari pidana penjara.
- d. Hukuman denda itu merupakan pidana utama, sementara pidana kurungan sebagai alternatif.
- e. Denda itu dijatuhkan berbarengan dengan pidana penjara.
- f. Pidana denda yang dijatuhkan bersama dengan pidana kurungan, sesuai dalam Pasal 406, Pasal 489, Pasal 529, dan Pasal 532 KUHP.
- g. Mengenai penjatuhan hukuman denda yang terpisah dan atau disatukan dengan jenis hukuman yang lainnya dapat dilihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang Delik Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999.

Lebih lanjut pada prinsipnya perihal mengenai pidana denda keberadaannya harus mengacu pada hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Besarnya denda itu sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut:
  - Jika denda atau setengah rupiah atau kurang, gantinya satu hari,
  - Jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari,
- e. Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, karena ada gabungan kejahatan, karena berulang membuat kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP.
- f. Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak lebih dari delapan bulan (Pasal 30 KUHP).

b. Pidana tambahan, antara lain :

- 1) pencabutan beberapa hak tertentu

Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, di dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 KUHP.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 205.

Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat dipisahkan) dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabila hakim hendak menjatuhkan pidana berupa pencabutan beberapa hak tertentu, seorang hakim harus menyertakan di dalamnya pencabutan beberapa hak tertentu bersama dengan pidana pokok.

Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar bahwa apapun jenis kejahatannya maupun pelanggaran, hakim dapat sekaligus menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu.

Ha! ini sesuai dengan pendapat dari Lamintang<sup>32</sup> dengan mengatakan :

"Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara limitatif tentang kriteria yang dapat dipedomani oleh hakim sehingga ia menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu. Dalam arti, apakah seluruh kejahatan dan pelanggaran yang terdapat di dalam KUHP dapat dikenakan pidana tambahan tersebut, di samping pidana pokoknya."

Lebih lanjut Waluyadi menjelaskan, undang-undang hanya menjelaskan dalam Pasal 128 KUHP, bahwa :

- a. Jika pidana karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 104 dapat dijatuhi pidana pencabutan hak-hak tersebut pada Pasal 35, ke-1 sampai dengan ke-5;
- b. Pada waktu menjatuhkan pidana salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 106-108, Pasal 110-125, maka dapat dijatuhkan pula pidana pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-5;
- c. Pada waktu menjatuhkan pidana sebab kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 127 maka yang bersalah dapat dipecat dari jabatan yang dijalankan pada waktu melakukan kejahatan itu, dari hak yang tersebut dalam Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-4 dan dapat pula diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 213.

Jika pembuat undang-undang tidak menjelaskan dan menegaskan bahwa hanya kejahatan-kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 104, Pasal 106-108, dan Pasal 110-125 KUHP sementara pasal di luar itu tidak ditegaskan untuk tidak dibebani pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, akan memberikan pengertian bahwa jenis pidana tersebut dapat di mungkinkan untuk dijatuhkannya. Jika demikian yang terjadi, maka akan kembali kepada keyakinan hakim. Dalam arti, apakah sesuatu kejahatan itu perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu atau tidak sangat tergantung kepada penilaian hakim.

## 2) Perampasan beberapa barang tertentu

Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum. Istilah lain dari kata perampasan barang ini dapat kita temukan di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dikenal dengan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 ke-16 KUHP).

Mengacu pada KUHP dan KUHP akan memberikan penafsiran yang berbeda dalam memberikan dua jenis fungsi dan maksud dari penyitaan itu. Menurut KUHP, penyitaan akan dilaksanakan oleh penyidik (penyidik Polri dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi



kewenangan untuk itu) guna kepentingan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, peradilan: sidang pengadilan), atau dengan kata lain bahwa maksud dari penyitaan dalam KUHP adalah untuk kepentingan pembuktian.

Berbeda dengan KUHP, penyitaan menurut KUHP adalah demi untuk kepentingan Negara yang dinyatakan dengan keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di samping hukuman pokok. Ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 39 KUHP, yang mengatur :

1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk mengerjakan kejahatan, boleh dirampas.
2. Jika seseorang dipidana karena melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran, boleh juga dijatuhkan pidana rampasan itu dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Pidana rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita.

Pasal 39 KUHP tersebut merupakan asas umum dari penyitaan, yang menerangkan bahwa pada dasarnya barang-barang yang dapat disita dan penyitaannya harus berbarengan dengan dijatuhi hukuman pokok meliputi:

- Benda yang diperoleh dari kejahatan;
- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan;
- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan karena tidak sengaja dan atau karena melakukan pelanggaran melalui undang-undang.

3) Pengumuman putusan hakim.

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini, dalam hukum acara pidana sering disebut sebagai asas-asas umum pemeriksaan sidang pengadilan.

Di samping ketentuan Pasal 195 KUHAP yang menegaskan agar semua putusan diucapkan dalam situasi sidang yang terbuka untuk umum, maka dalam permulaan sidang pun disyaratkan hendaknyadilaksanakan dengan terbuka untuk umum serta menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh terdakwa atau saksi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 153 KUHAP yang menentukan bahwa :

1. Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
2. a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.  
b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban yang tidak bebas.
3. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang dapat menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 menyebabkan batalnya putusan demi hukum.
5. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

### **C. Tinjauan Umum tentang Teroris**

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai

terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.<sup>33</sup>

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.<sup>34</sup>

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang . Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror ( *under the terror* ), berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang berarti gemetaran dan “*detererre*” yang berarti takut .<sup>35</sup> Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik.

Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya

---

<sup>33</sup> Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates. Jakarta. h 17

<sup>34</sup> *Ibid* Hal 18-19

<sup>35</sup> Bambang Abimanyu. 2005. *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta:...hal 62

untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang. Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai pada non komformis politik. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka.

Menurut Kacung Marijan,<sup>36</sup> kata teror disebutkan dengan istilah *system, regime de terreur* yang kali pertama muncul pada tahun 1789 di dalam *Le Dictionnaire de L'Academie Francaise*. Konteks revolusi Prancis lekat di dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang lalim dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan. Namun, praktik-praktik terorisme sudah lama terjadi sejak sekitar 66-67 sebelum Masehi, ketika kelompok ekstrem Yahudi melakukan aksi teror, termasuk di dalamnya pembunuhan, terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya (kira-kira di wilayah yang dipersengketakan oleh Israel dan Palestina sekarang).

Sejak saat itu, aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi. Sedangkan menurut Jainuri<sup>37</sup> (2006), istilah teror dan terorisme telah menjadi idiom ilmu sosial yang sangat populer pada dekade 1990-an dan awal 2000-an sebagai bentuk kekerasan agama. Meskipun terorisme, sesungguhnya bukanlah

---

<sup>36</sup>Zulf Mubarak, *Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*, Jurnal Studi Masyarakat Islam Volume 15 Nomor 2 Desember 2012, Pascasarjana UMM, h. 241

<sup>37</sup> *Ibid*

sebuah istilah baru. Tindakan teror telah muncul sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana putra Adam, Qabil menteror Habil, karena dinilai menjadi penghambat keinginan Qabil.

Beberapa bentuk teror telah menjadi cara yang umum untuk mengintimidasi lawan. Orang yang percaya bahwa dengan kekerasan dapat mengintimidasi musuh atau lawan agar takut Sebagai sebuah label untuk tindakan kekerasan, istilah ini mencerminkan makna negatif bagi mereka yang dijuluki teroris. Dalam pengertian ini teroris disamakan dengan istilah menyakitkan lainnya dalam khazanah bahasa politik, seperti rasis, fasis, atau imperialis.

Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara, bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh "teroris" yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan.

Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah *State Terrorism*, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang.

Terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga sepatutnya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal. Pada umumnya orang sipil

merupakan sasaran utama terorisme, dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Peter M. Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>39</sup> yaitu Tinjauan Hukum Terhadap Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Teroris, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2005, Hal 35.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 133.

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>40</sup>

### **C. Bahan Hukum**

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, Hal. 135.

<sup>41</sup>*Ibid*, Hal. 181.



#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terorisme adalah bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selama ini pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum terkait masalah terorisme masih sangat terbatas pada bagaimana mengejar pelaku terror saja sehingga nantinya pelaku terror tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah pendekatan seperti ini terbukti tidak efektif dan tidak membuat perbuatan atau kegiatan teror ini berhenti, karena jaringan terorisme sangat luas dan tetap terus ada serta sangat tersembunyi sehingga membuat eksistensi mereka masih terjagasampai saat sekarang. Hal ini semakin jelas jika dikaitkan dengan sebuah pertanyaan mengapa kegiatan

teroris tersebut masih tetap berjalan disaat para pelaku atau pemimpinnya sudah ada beberapa yang tertangkap bahkan tewas ditempat ketika sedang melakukan perlawanan dengan aparat hukum negara

Salah satu alasan yang muncul dari pertanyaan diatas adalah karena pendanaan terhadap aktifitas teroris itu masih tetap mengalir dan terjaga sehingga dana tersebut nantinya digunakan untuk mendanai setiap rancangan aksi teror yang akibatnya menjadikan Indonesia sebagai lahan subur untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan terorisme. Teror seperti yang diketahui merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisasi (*organised crime*) yang memiliki jaringan luas. Mereka tidak hanya menyediakan para pelaku yang siap secara sukarela meledakan diri, namun juga mereka yang menyediakan dana sebagai pembiayaan pembelian bahan peledak, senjata, penyewaan markas atau persembunyian dan biaya operasional lainnya

Sedangkan kita ketahui bersama bahwa salah satu isi bagian dari preambule UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Sehingga dari perspektif ini negara Indonesia melalui pemerintahanya wajib memerangi segala sesuatu yang bertentangan dari isi pembukaan tersebut dan ini menjadi hal mutlak untuk dilakukan. Terlebih apabila hal tersebut menjadi ancaman yang serius bagi Rakyat

Indonesia beserta kedaulatan negara ini. Sehingga aturan terkait pendanaan kegiatan terorisme harus dibuat sebagai konsekuensi dari negara Indonesia yang didalam konsitusi disebutkan sebagai negara hukum sehingga dasar filosofis Undang-undang pendanaan terorisme ini dibuat bukan hanya karena keresahan terhadap banyaknya ancaman bom atau bentuk terorisme yang lainnya seperti kejadian akhir-akhir ini namun sebagai representasi dari perwujudan pemerintah mencapai tujuan negara

Pada tahun 2013 dibuatlah UU 9/2013 sebagai bukti bahwa pendanaan terhadap aksi teror di Indonesia dikatakan sebagai perbuatan pidana, sehingga dari perspektif ini terjadi kriminalasi terhadap pelaku pendanaan terorisme di Indonesia. Permasalahan yang lain terkait terorisme yaitu semua organisasi terorisme itu sangat terorganisasi dengan baik dengan jaringan-jaringan terror yang mempuni baik secara global atau lintas batas negara, maka pendekatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana terorisme tidak lagi menjadi sesuatu yang efektif untuk mencegah dan menindak para pelaku yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Mulai dari aktor intelektual, penyandang dana, hingga pelaku dilapangan. UU 9/013 ini menjadi salah satu upaya negara melindungi warga negara dan kedaulatannya dari tindakan terorisme, dengan cara mencegah pendanaan terorisme itu sendiri, khususnya yang melalui penyedia jasa keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, kustodian, manajer investasi, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat

pembayaran kartu, penyelenggara e-money atau e-wallet, koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan berjangka komoditas, dan/atau perusahaan penyedia jasa peniriman uang. UU 9/2013 di dalam BAB I nya menjelaskan berbagai macam definisi dari tiap istilah-istilah yang digunakan untuk menyamakan pemahaman umum dari keseluruhan substansi yang akan dibahas. Definisi pendanaan terorisme ini harus dipahami dari dua sudut vital pendanaan itu sendiri, pertama pendanaan untuk operasional kegiatan terorisme itu sendiri kemudian pendanaan penyebaran ideologi dan /atau infrastruktur jaring-jaring kelompok terorisme itu sendiri.

Pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui beberapa metode. Metode pertama melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan bukan bank. Kedua, perdagangan internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi pada sektor tersebut. Mereka dapat memperoleh dana dari hasil berjualan barang-barang elektronik, kebutuhan pokok, atau barang-barang lain yang memang legal dapat diperjualbelikan. Ketiga melalui kegiatan keuangan tradisional/ alternatif seperti Hiwala di India yang menyediakan jasa penitipan uang secara tradisional tanpa masuk ke dalam sistem perbankan konvensional.

Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan-kegiatan terorisme. Sehingga dianggap penting untuk dilakukan sikap preventif sebagai bentuk pencegahan terhadap masalah terorisme yang baik secara nasional maupun

internasional masalah terorisme dikatakan sebagai kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Dan karena pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah terlihat belum maksimal. Upaya pemerintah tersebut hanya terfokus pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.

Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif di dalamnya. Hal ini akan mencegah atau memutus jaringan-jaringan terorisme. Salah satu diantaranya adalah dengan memutus atau menghentikan aliran dana teroris. Namun dalam penegakan hukum untuk mengusut tuntas masalah pendanaan terorisme masih mengalami kesulitan hal ini di karenakan jaringan-jaringan sumber pendanaan terorisme sangat rahasia. Pemberantasan terhadap pendanaan terorisme merupakan pergeseran dan pendekatan baru untuk memberantas tindak pidana terorisme hal ini dikarenakan telah terjadi banyak fenomena yang ditemukan saat dilakukannya penyelidikan

terorisme itu sendiri, salah satunya adalah sumber-sumber dana yang sangat besar datang dari akun rekening yang tidak dikenal atau dikirimkan oleh pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana utama teroris tersebut. Pada intinya pendanaan teroris, adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang mendukung, merencanakan atau melakukan terorisme.

#### **A. Suatu Perbuatan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pendanaan Teroris**

Pasal 1 ayat 1 UU9/2013 mengatur bahwa Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Sedangkan tindak pidana terorisme yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pada kasus penemuan bahan peledak milik kelompok Santoso<sup>42</sup>telah tertangkap, Rianto Margono alias Ato oleh Detasemen

---

<sup>42</sup>Kelompok Islam militan bernama Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir menjadi salah satu akar lahirnya kelompok santoso, selain kerusakan yang terjadi saat ini diPoso. Kelompok Santoso merupakan kepala kelompok terorisme yang ada

diIndonesia saat ini yang sedang diburu oleh para aparat gabungan Polri dan TNI yang berbagung dalam Satgas Operasi Tinombala guna menangkap para kelompok teroris pimpinan Santoso atau yang sering disebut juga teroris kelompok Santoso. Pada Senin 18 Juli 2016, menjadi prestasi besar bagi tim Satgas Operasi Tinombala. Santoso yang selama ini diburu dalam Operasi Camar Maleo I hingga IV akhirnya tewas ketika sandi operasi berganti menjadi Operasi Tinombala.Kematian Santoso ini berawal dari kontak tembak di sekitar Desa Tambrana, Poso Pesisir Utara sekira pukul 17.00 WITA. Dalam baku tembak selama lebih kurang setengah jam itu dua orang tewas. Mereka adalah Santoso dan pengikutnya Mukhtar.

Khusus Antiteror atau Densus 88 Polri di Pasar Sentral, Poso. Pengadilan Tinggi Jakarta Timur P U T U S A N NOMOR : 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM menyatakan terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam dakwaan pertama kesatuan bersalah melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
  2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme
  3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung ;
  4. Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris
-



Namun sebelum menentukan apakah dana ini merupakan dana yang memang pada dasarnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terorisme, aparaturnegara hukum harus dulu menentukan apakah pantas kelompok ini ataupun individu ini dicurigai sebagai pelaku-pelaku aksi terror agar kucuran dana bagi kelompok ataupun individu ini dapat diusut dengan tuntas. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Kepala Polisi Republik Indonesia berhak mengajukan nama seseorang atau kelompok sebagai teroris. Dijelaskan bagaimana prosedur penetapan seseorang atau kelompok dalam daftar teroris yang ada di Indonesia.

Ada dominasi mutlak yang diberikan kepada Kepolisian untuk menentukan siapa yang bisa atau tidak dikatakan sebagai teroris. Status sebagai teroris atau kelompok teroris berlaku selama 6 (enam) bulan. Apabila kepolisian menginginkan untuk dilakukannya perpanjangan, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk diperpanjang hingga kasus tersebut terselesaikan. Namun perpanjangan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali, masing-masing 3 (tiga) bulan.

Dalam hal menetapkan subjek hukum telah melakukan perbuatan tindak pidana pendanaan terhadap aksi terorisme bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan sembarangan harus ada prosudural hukum dalam hal mengatakan apakah seseorang bersalah ataupun tidak terkait masalah terorisme agar subjek hukum dapat merasakan keadilan untuk setiap keputusan aparaturnegara hukum, sehingga menurut hukum dalam hal menentukan apakah subjek hukum telah melakukan tindak pidana haruslah subjek hukum tersebut memenuhi unsur-unsur pidana,

baik subjektif maupun unsur objektif dari suatu perbuatan pidana dan ini juga berlaku pada tindak pidana pendanaan terorisme, subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana terorisme haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme

Unsur subjektif pada hukum pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari uraian diatas menyimpulkan bahwa pada tindak pidana terorisme pasti memiliki unsur-unsur pidana sehingga ketika subjek hukum melakukan suatu perbuatan hukum, unsur-unsur tersebut nantinya menjadi indikator penilaian terhadap subjek hukum terkait masalah

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm. 193.

pendanaan terorisme, sehingga dapat ditentukan apakah subjek hukum telah melakukan pendanaan ataupun tidak,

Unsur subjektif pada tindak pidana terorisme yaitu adanya kesengajaan atau kelalaian pada subjek hukum pendanaan terorisme, maksudnya perbuatan subjek hukum terkait pendanaan pada dasarnya dikehendaki oleh pelaku pendanaan dan dalam hal pendanaan kegiatan terorisme pun subjek hukum tindak pidana pendanaan terorisme mengetahui hal tersebut dalam artian subjek hukum pendanaan terorisme mengetahui dana tersebut diberikan dengan tujuan apa, sedangkan unsur objektif pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme yaitu adanya aturan tentang tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia tapi masih tetap dilakukan pendanaan oleh subjek hukum untuk kegiatan aksi terror sehingga subjek hukum dikatakan telah melanggar hukum, selanjutnya yaitu subjek hukum memenuhi kualitas tertentu misalkan subjek hukum mampu memberikan bantuan dana terhadap kelompok terorisme, dalam artian subjek hukum mampu dan secara objektif telah memenuhi kualitas syarat untuk memberikan bantuan, dan unsur objektif lainnya yaitu, adanya akibat dari perbuatan pemberian dana tersebut, misalkan semakin masifnya gerakan-gerakan terorisme yang ada.

Unsur-unsur dalam tindak pidana terorisme merupakan hal yang sangat penting keberadaanya, karena dengan unsur-unsur ini keadaan hukum seseorang ditentukan terkait apakah subjek hukum telah melakukan kejahatan ataukah tidak, pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan

pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme apabila subjek hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum pidana baik objektif maupun subjektifnya. Dengan adanya unsur-unsur ini aparaturnya negara tidak bisa sewenang-wenang menentukan bahwa subjek hukum telah melakukan kejahatan pendanaan terorisme karena unsur-unsur pidana ini yang nanti menjadi tolak ukur suatu peristiwa pidana, karena hukum sangat tidak mencerminkan keadilan apabila subjek hukum yang dikatakan telah melakukan perbuatan pendanaan terhadap aksi teror oleh aparaturnya hukum negara tetapi subjek hukum tersebut tidak satu pun memenuhi unsur-unsur pidana pada kasus pendanaan terorisme

Telah dijelaskan dalam UU 9/2013 pada Pasal 1 ayat (2) bahwa tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan aturan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga secara jelas bahwa subjek hukum dikatakan telah melakukan perbuatan pidana pendanaan apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana pada UU 9/2013. Namun dalam hal menetapkan subjek hukum telah melakukan kejahatan pendanaan bukanlah hal yang mudah diperlukan kerjasama bagi semua bidang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme agar pemberantasan pendanaan terorisme dapat berjalan secara efektif

Secara umum pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui beberapa metode. Metode pertama melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan bukan bank. Kedua, perdagangan internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi

pada sektor tersebut. Kelompok terorisme dapat memperoleh dana dari hasil penjualan barang-barang elektronik, kebutuhan pokok, atau barang-barang lain yang memang legal dapat diperjualbelikan. Ketiga, melalui kegiatan keuangan tradisional/ alternatif seperti Hiwala di India yang menyediakan jasa penitipan uang secara tradisional tanpa masuk ke dalam sistem perbankan konvensional..

Pendanaan terhadap terorisme merupakan kunci utama dari masifnya gerakan terorisme di Indonesia hal ini disebabkan karena sebelum melakukan aksi terornya, teroris perlu memenuhi fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah aksi terornya. Mereka membutuhkan bahan-bahan untuk membuat bom. Teroris butuh tempat untuk merakit dan menyimpan logistik. Mereka juga butuh kendaraan untuk memfasilitasi pergerakan logistik dan anggotanya.

Untuk memperlancar kegiatan itu, teroris membutuhkan uang yang tidak sedikit. Angka tersebut akan jauh lebih besar jika memasukkan anggaran training, perjalanan, tempat tinggal, biaya hidup sehari-hari, visa dan paspor, serta kendaraan lain untuk membiayai operasi, teroris juga membutuhkan dana untuk pelatihan dan perjalanan, membangun dan membiayai rumah, menyiapkan upah atau pekerjaan harian. Teroris juga membutuhkan dana untuk memelihara infrastruktur dan membuat dokumen palsu, selain itu uang juga digunakan teroris untuk mendapatkan senjata dan menyuap informan. Dokumen palsu penting bagi teroris sebagai bagian dari penyamaran. Seorang teroris biasa memiliki banyak nama atau alias agar tidak mudah terlacak petugas. Dokumen palsu

dalam bentuk paspor maupun KTP akan memudahkan teroris saat tinggal di tengah masyarakat ataupun saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Dokumen palsu muncul karena dibuat dengan melahirkan identitas baru atau mencuri identitas orang lain

Dari perspektif ini pendanaan terhadap terorisme merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga para teroris melakukan berbagai upaya agar tetap mendapatkan dana tersebut, sehingga menjadi hal yang mesti UU 9/2013 hadir untuk memutus aksi pendanaan terorisme ini karena untuk mengurangi aksi terorisme tersebut haruslah diputus sampai ke dasarnya yaitu pada persoalan anggaran pendanaan terorisme, sehingga bagi subjek hukum manapun apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan haruslah segera di proses secara hukum agar aksi-aksi terorisme semakin berkurang bahkan sampai tidak ada lagi.

#### **B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Teroris**

Pertanggung jawaban hukum adalah sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan atau dengan kata lain tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Pertanggung jawaban hukum juga merupakan konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga pertanggung jawaban pidana pada pelaku pendanaan terorisme

merupakan pelaksanaan peran dari konsekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pendanaan dimana konsekuensi perbuatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa dalam hukum yang melakukan pertanggung jawaban adalah subjek hukum sehingga penulis merasa perlu menguraikan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi subjek hukum pada tindak pidana pendanaan terorisme. Subjek hukum pada tindak pidana pendanaan terorisme yaitu seseorang dan korporasi badan hukum sehingga kedua subjek hukum inilah yang dapat dibebankan tanggung jawab pada tindak pidana pendanaan terorisme. Dimana pertanggung jawaban kedua subjek hukum ini berbeda, hal ini disebabkan bentuk perlakuan kedua subjek hukum tadi berbeda pula terkait masalah pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia sehingga bentuk pertanggung jawaban keduanya berbeda pula, karena bentuk pertanggung jawaban disesuaikan dengan kualitas-kualitas perilaku subjek hukum

Dalam Pasal 4 UU 9/2013 dikatakan Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam undang-undang ini subjek hukum perseorang yang

melakukan pendanaan terhadap kegiatan terorisme apa bila terbukti telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pendanaan terorisme dipenjara maksimal 15 tahun, hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban yang merupakan akibat dari tindak pidana pendanaan yang dilakukan oleh subjek hukum seseorang sehingga secara tegas dan jelas undang-undang ini menjelaskan bahwa penjara adalah pertanggung jawaban yang akan dibebankan kepada mereka pelaku kejahatan pendanaan terorisme, selain penjara pertanggung jawaban lain bagi subjek hukum perseorangan pada tindak pidana pendanaan terorisme yaitu membayar denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan pada Pasal 6 UU 9/2013 menjelaskan Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bentuk pertanggung jawaban bagi subjek hukum yang merencanakan, mengorganisasikan atau menggerakkan orang lain terkait pendanaan terorisme di pidana paling lama seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun penjara, hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban hukum bagi subjek hukum persorangan apabila terbukti telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 6 UU 9/2013. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan karena subjek hukum yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan terorisme biasanya juga merupakan hasil



dari ajakan dari subjek hukum lainnya, dengan tujuan agar semakin masifnya gerakan-gerakan teroris karena semakin banyaknya penyandang dana terhadap masalah terorisme sehingga bagi subjek hukum yang menggerakkan orang lain perlu mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, agar tujuan hukum dapat terpenuhi dengan subjek hukum mendapatkan keadilan melalui hukum.

Sedangkan pada kasus korporasi didalam UU 9/2013 dijelaskan bahwa pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
- d. Dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Sehingga dalam hal pertanggung jawaban korporasi pada permasalahan pendanaan terorisme haruslah disesuaikan terlebih dahulu maksudnya yaitu apakah sebuah korporasi telah memenuhi syarat-syarat pidana terkait masalah terorisme, agar aparat hukum negara tidak sewenang-wenang dalam hal menetapkan korporasi yang telah melakukan pendanaan. Pada Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ini merupakan pertanggung jawaban subjek hukum korporasi pada tindak pidana pendanaan terorisme dimana pidana pokok ini menjadi kewajiban bagi korporasi untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
- b. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
- c. Pembubaran Korporasi;
- d. Perampasan aset Korporasi untuk negara;
- e. Pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
- f. Pengumuman putusan pengadilan.

Bentuk pertanggung jawaban korporasi pada pidana tambahan ini merupakan hal yang penting dilakukan agar korporasi yang melakukan pendanaan terhadap aksi-aksi terror semakin berkurang, karena dengan pidana tambahan ini korporasi yang melakukan pendanaan dicabut izin usahanya, dilakukan pembekuan kegiatan korporasi, perampasan asset sehingga korporasi tidak bisa lagi memberikan dana terhadap aksi-aksi terror yang ada di Indonesia. Pada Pasal 6 UU 9/2013 dijelaskan pula dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan maksudnya yaitu apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap korporasi tidak dapat membayar sanksinya, maka aset korporasi dan/atau personel pengendalinya harus dirampas untuk negara. Kemudian apabila masih belum mencukupi, maka akan ada sanksi pidana penjara bagi personel pengendalinya.

Pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dibutuhkan kerjasama bagi semua pihak agar pemberantasan tindak pidana

pendanaan ini dapat berjalan dengan baik mengingat kegiatan terorisme merupakan salah satu jenis dari *Activities of Transnational Criminal Organizations* merupakan kejahatan yang sangat ditakuti, mengingat ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup luas, yang meliputi: ancaman terhadap kedaulatan, terhadap masyarakat, terhadap individu, terhadap stabilitas nasional, terhadap nilai-nilai demokratis dan lembaga-lembaga publik, terhadap ekonomi nasional; terhadap lembaga keuangan, terhadap demokratisasi, dan terhadap pembangunan negara. Karena itu, adalah sulit untuk tidak mengingat aktivitas para teroris, apalagi ditunjang dengan pemberitaan di berbagai media televisi, surat kabar, majalah, dan websites yang menampilkan gambar-gambar kekerasan yang dilakukan oleh teroris dan korban yang berjatuhan, sehingga menjadi sebuah kewajiban seluruh elemen dari negara haruslah bekerjasama agar kegiatan-kegiatan terorisme dapat semakin berkurang bahkan sampai tidak ada lagi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Unsur-unsur dalam tindak pidana pendanaan terorisme yaitu Setiap orang, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukantindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan danabaik langsung maupun tidak langsung, Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidanaterorisme, organisasi teroris, atau teroris. Dengan unsur-unsur ini keadaan hukum seseorang ditentukan terkait apakah subjek hukum telah melakukan kejahatan atautakah tidak, pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme apabila subjek hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum pidana baik objektif maupun subjektifnya.
2. Pertanggung jawaban pada tindak pidana pendanaan terorisme merupakan konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga pertanggung jawaban pidana pada pelaku pendanaan terorisme merupakan pelaksanaan peran dari konsekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pendanaan dimana konsekuensi perbuatanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku diindonesia.

Dimana bentuk pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yaitu pertanggung jawaban ganti rugi dan pidana penjara bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia

## **B. Saran**

1. Undang-undang ini akan sangat efektif berjalan apabila diawali dengan semangat untuk memberantas terorisme, sehingga pemerintah seharusnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat umum mengetahui apa-apa saja yang menjadi indikasi seseorang dikatakan terorisme, dan menjelaskan pula bahwa harus dilaoparkan kemana subjek hukum yang bersindiket terorisme tersebut agar terbangunya kerja sama antara elemen pemerintah dan masyarakat dalam hal pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana terorisme di Indonesia
2. Sebaiknya semua perangkat pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan pendanaan terorisme, perlu menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan pendanaan terorisme dan undang-undang yang terkait dengan masalah pendanaan terorisme, mengingat upaya pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme yang hendak melakukan aksinya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Bandung.
- Bambang Abimanyu. 2005. *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo : Jakarta
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty : Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika : Jakarta.
- Hambali Thalib, 2005, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Umitoha Ukhuwah Grafika : Makassar*.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lamintang. P.A.F. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Rusli Effendy, 1989. *Asas Asas Hukum Pidana*. Leppen UMI. Ujung Pandang.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materi*. UMM Press : Malang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group : Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group : Jakarta.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan : Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika : Jakarta.
- Zainal Abidin Faried dan Andi Hamzah. 1983. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Sumber Ilmu Jaya : Jakarta.

## **B. Jurnal, Majalah dan Website**

Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Vinsensio Dugis & Baiq Wardhani, *Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan Dan Penanganan Terorisme Di Indonesia*. Makalah ini ditulis untuk dipresentasikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* Kajian dan Perumusan Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan Dan Penanganan Terorisme di Indonesia, yang diselenggarakan bersama oleh *Indonesia Crime Prevention Foundation (ICPF)* dan Kemitraan Partnership, di Ruang Arjuna Weliarang, Hotel Santika, Jln. Pandegiling 45, Surabaya, Senin 27 Agustus 2007

Zulf Mubarak, *Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*, Jurnal Studi Masyarakat Islam Volume 15 Nomor 2 Desember 2012, Pascasarjana UMM

<https://nasional.sindonews.com/read/1166542/14/selama-2016-kejahatan-terorisme-naik-107-persen-1482931739> diakses pada tanggal 11 Januari 2017

<https://beritagar.id/artikel/berita/pembayaran-virtual-instrumen-favorit-pengaliran-dana-terorisme> diakses Pada Tanggal 11 Januari 2017